



<https://jurnal.universitaspurabangsa.ac.id/index.php/fokbis/index>
ISSN: 2623-2480/ P-ISSN: 1693-5209

Effect of Good Corporate Governance and Sustainability Reporting to the Integrated Reporting Moderation Firm Size

Dian Murdianingsih¹, Agung Prayogi², Tri Handayani³
Institut Teknologi dan Bisnis ADIAS^{1,3}, Universitas Peradaban²
email: dian.murdianingsih20@gmail.com¹

Article Information

History of Article:

Received April 18th 2022

Accepted July 7th 2022

Published July 12th 2022

DOI:

10.32639/fokbis.v21i1.75



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah. Menganalisis dampak tata kelola yang baik dan keberlanjutan pada pelaporan terintegrasi dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderat. Penelitian dilakukan pada perusahaan pertambangan. periode tahun 2019-2021. Sampel penelitian diperoleh sebanyak 44 perusahaan dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda, *Moderated Regression Analysis*. Hasil analisis data menemukan bahwa komisaris independen dan Sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap integrated reporting, dan Firm Size mampu memoderasi hubungan antara Good Governance dan Sustainability Reporting terhadap integrated reporting. Berdasarkan hasil penelitian, investor dapat mempertimbangkan dan memperhatikan kehadiran komite audit sebagai internal dalam perusahaan sebelum melakukan investasi.

Kata Kunci: Komisaris independen; Komite Audit; Sustainability Reporting; Firm Size

ABSTRACT

The aim of this research is. Analyzing the impact of good governance and its occurrence on integrated reporting with company size as a moderate variable. The research was conducted on mining companies. the period 2019-2021. The research sample was obtained as many as 44 companies with purposive sampling method. The data analysis technique used multiple linear regression, Moderated Regression Analysis. The results of data analysis found that independent commissioner reporting and sustainability had no effect on integrated reporting, and Firm Size is able to moderate the relationship between Good Governance and Sustainability Reporting on integrated reporting. Based on the research results, investors can consider and pay attention to the presence of the audit committee as an internal company before investing.

Keywords: Independent commissioner; Audit Committee; Sustainability Reporting; Company Size

PENDAHULUAN

Saat ini, tren konsep baru keterbukaan informasi dalam sebuah laporan telah menjadi aspek penting dalam laporan tahunan perusahaan dan menjadi perhatian direksi sebagai strategi mereka. Konsep baru laporan disebut pelaporan terintegrasi, yang secara efektif membantu perusahaan dan dewan direksi untuk menghubungkan manajemen internal penggerak nilai bisnis dengan kinerja keuangan dan non-keuangan (PWC, 2015). Pelaporan terintegrasi telah berkembang di Afrika Selatan sejak tahun 2010 dan berkembang pesat setelah International Integrated Reporting Council merilis kerangka kerja mengenai pelaporan terintegrasi (Adams, 2014).

Pelaporan terintegrasi adalah proses menemukan pemikiran terintegrasi dengan tujuan untuk menerbitkan laporan terintegrasi berkala tentang penciptaan nilai oleh organisasi atau bisnis (Hurgish, 2017). Lebih-lebih lagi, pelaporan terintegrasi adalah tren baru dari laporan yang menggambarkan kinerja dan penciptaan nilai perusahaan berdasarkan konektivitas antara informasi keuangan dan nonkeuangan, tata kelola dan remunerasi, masalah lingkungan dan sosial serta faktor bisnis lain yang relevan (Roxana & Petru, 2017). Yang penting, pelaporan terintegrasi berusaha untuk menggabungkan dua bentuk tradisional pelaporan perusahaan yaitu pelaporan keuangan dan keberlanjutan untuk mengkompensasi kekurangan diidentifikasi prosedur pelaporan perusahaan sebelumnya (Clayton et al., 2015).

Pelaporan terintegrasi berusaha untuk menggabungkan dua bentuk tradisional pelaporan perusahaan yaitu pelaporan keuangan dan keberlanjutan untuk mengkompensasi kekurangan diidentifikasi prosedur pelaporan perusahaan sebelumnya (Clayton et al., 2015). lingkungan dan sosial serta faktor bisnis lain yang relevan (Roxana & Petru, 2017). Yang penting, pelaporan terintegrasi berusaha untuk menggabungkan dua bentuk tradisional pelaporan perusahaan yaitu pelaporan keuangan dan keberlanjutan untuk mengkompensasi kekurangan diidentifikasi prosedur pelaporan perusahaan sebelumnya (Clayton et al., 2015).

(Ballou, Casey, Grenier & Heitger, 2012) Pelaporan terintegrasi bertujuan untuk mengatasi keterbatasan pelaporan keuangan tradisional dan pelaporan keberlanjutan, memberikan informasi yang lebih komprehensif, efektif, transparan, dan lebih terintegrasi, yang diyakini dapat menghadirkan perspektif bisnis. Satu laporan. Pelaksanaan kinerja perbankan yang transparan difasilitasi dengan adanya tata GCG yang baik. konsep GCG bertujuan untuk mendorong bank menciptakan budaya yang mendukung profesionalisme, integritas, kualitas layanan, dan prudential banking. Kegagalan untuk mematuhi tata kelola dapat membuat bank menghadapi risiko keuangan dan reputasi.

Pelaporan terintegrasi adalah konsep yang relatif baru dan banyak penelitian yang belum dilakukan tentang pelaporan terintegrasi di Indonesia. Alasan memilih perusahaan pertambangan adalah karena erat kaitannya dengan eksplorasi lingkungan, yang dapat merusak lingkungan. Secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi keseimbangan antara lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Rudi Kurniawan (2017) menemukan bahwa Komite Audit menggunakan Kerangka Pelaporan Terintegrasi untuk mempengaruhi pelaporan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Dianar Prawesti (2016) yang menyatakan bahwa Komite Audit tidak mempengaruhi pelaporan terintegrasi, tetapi usia perusahaan mempengaruhi pengungkapan laporan terintegrasi dan keberlanjutan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini memperkuat hubungan antara variabel Good Corporate Governance (GCG) dan Sustainability Reporting (SR) dalam pelaporan terintegrasi, serta menciptakan laporan keuangan perusahaan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis memfokuskan pada judul penelitian "Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Sustainability Reporting (SR) terhadap Integrated Reporting sebagai Variabel yang Dapat Disesuaikan untuk Ukuran Perusahaan".

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Pemangku Kepentingan

Menurut teori pemangku kepentingan, perusahaan dapat mempertahankan hubungan pemangku kepentingan yang kuat dengan mencapai tujuannya.. Teori tersebut juga menyatakan bahwa harapan pemegang saham dan kemampuan untuk memenuhi tuntutan mereka sangat penting untuk menjaga legitimasi perusahaan dan mencapai kinerja yang berkelanjutan (Ferri *et al.*, 2016). Dalam hal ini, Oshika dan Saka (2017) menyimpulkan bahwa alasan utama di balik mengapa perusahaan Jepang dianggap lebih berkelanjutan adalah karena manajemen mengadopsi filosofi “Memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan” untuk kesuksesan bisnis, dan mereka mengungkapkannya dalam laporan keberlanjutan mereka. Setelah krisis keuangan global tahun 2008, pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya melihat lebih dekat kelangsungan hidup dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang (S. Adams & Simnett, 2011). Oleh karena itu, mereka menuntut lebih banyak informasi nonkeuangan dan mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi tentang tata kelola, masalah sosial, masalah lingkungan, dan keberlanjutan dalam laporan tahunan mereka (Camilleri, 2018; Needles *et al.*, 2016; Velte & Stawinoga, 2017).

Pengungkapan keberlanjutan sejalan dengan tujuan IR, yang menekankan penyediaan informasi berkualitas tinggi, holistik, dan ringkas kepada pemangku kepentingan (Naynar *et al.*, 2018). Selain itu, IR mengurangi jumlah laporan untuk menghindari penyebaran pemangku kepentingan. Oleh karena itu, investor dan pemangku kepentingan lainnya bergantung pada laporan terintegrasi sebagai representasi yang tepat dari organisasi sosial. Menurut kerangka IR, meskipun tujuan utama dari laporan terintegrasi diarahkan pada penyedia modal keuangan, hal itu juga menguntungkan semua pemangku kepentingan yang tertarik pada penciptaan nilai perusahaan dari waktu ke waktu; pemangku kepentingan ini termasuk pelanggan, pemasok, karyawan, mitra bisnis, legislator, regulator, komunitas lokal, dan pembuat kebijakan (IIRC, 2013). IR harus menjelaskan dan menyertakan pengungkapan tentang distribusi nilai tambah bagi pemangku kepentingan perusahaan, untuk mencapai kepuasan mereka (Oshika & Saka, 2017). Nilai tambah ini dapat digunakan sebagai alat pelaporan yang praktis dan efisien (Haller & van Staden, 2014) yang membuat pemangku kepentingan lebih tertarik pada IR. Sedangkan untuk keterlibatan pemangku kepentingan oleh IR, perusahaan mencerminkan maksimalisasi nilai yang rasional (Parrot & Tierney, 2012).

Teori Agensi

Teori ini menjelaskan bagaimana pemilik perusahaan menyerahkan perusahaan kepada para profesional (agen) untuk menjalankan bisnisnya. Prinsipal adalah pemegang saham atau investor yang mempekerjakan agen. Tujuannya adalah agar pemilik bisnis mendapat untung dengan biaya lebih rendah. Penggunaan teori keagenan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan asimetris antara manajemen dan pemilik usaha diminimalkan atau dikelola melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Idealnya, melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan penyajian laporan yang tepat. pemilik perusahaan akan memiliki kepercayaan terhadap manajemen perusahaan tanpa memandang usia mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat mengurangi biaya pemantauan laporan keuangan.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi berfokus pada interaksi dengan bisnis pihak eksternal dengan mempertimbangkan sistem sosial yang berlaku. Melalui teori legitimasi ini, peneliti mencoba untuk mengetahui apakah perusahaan telah menerapkan Good Corporate Governance dan melaporkan pelaporan terintegrasi untuk mendapatkan citra positif dari publik karena telah mempertanggungjawabkan kinerjanya. Teori pemangku kepentingan berfokus pada cara-cara yang dapat digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingannya. Teori pemangku kepentingan bukanlah entitas di mana perusahaan bertindak semata-mata untuk keuntungannya, tetapi manfaat bagi pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditur, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, analis, dan pemangku kepentingan lainnya, artinya Anda harus menyediakan.

Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan oleh Indonesian *Institute for Corporate Governance* (IICG) dirancang untuk memandu perusahaan dan memberikan pedoman untuk memastikan bahwa operasi dan kegiatan mereka memenuhi harapan pemangku kepentingan seperti: Ini adalah serangkaian mekanisme. B...B. Pemegang Saham menjalankan bisnis. Prinsip-prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan ketidakberpihakan. Tujuan tata kelola perusahaan di bawah Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) adalah untuk memungkinkan perusahaan memenuhi hak dan kewajiban karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis, masyarakat, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. adalah. Warga negara, legislator. , Regulator dan pembuat kebijakan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Idealnya, perusahaan harus bebas dari benturan kepentingan, pengaruh, dan tekanan dari pihak lain agar dapat mengambil keputusan yang netral dan objektif. Komite adalah pihak yang mengawasi kebijakan manajemen, memastikan perusahaan beroperasi sesuai standar umum, memberi nasihat kepada direksi, dan memastikan perusahaan menerapkan GCG. Variabel struktural *corporate governance* dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut untuk menjelaskan persentase anggota komite independen, jumlah komite audit, dan pengukuran masing-masing agen:

a. Komisaris Independen

Pejabat independen terdiri dari pemegang saham, direksi dan anggota tidak memiliki hubungan bisnis dengan pejabat. Komisaris Independen diangkat berdasarkan kemampuan dan profesionalismenya terkait dengan kepentingannya (kepentingan semua pemangku kepentingan). Setidaknya satu perusahaan memiliki 30% anggota independen dari komite yang dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Hermalin & Weisbach (1998), sebagian besar pejabat independen dalam struktur dewan akan menguntungkan perusahaan karena perusahaan meneliti perspektif dan keahlian mereka dengan lebih baik dan lebih ekstensif. Komite Audit dinyatakan sebagai komite yang dibentuk oleh Komisi berdasarkan Peraturan 55/POJK.04/2015 Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembentukan dan Kebijakan Komite Audit untuk menjalankan usahanya. Bertanggung jawab untuk mendukung tugas dan fungsi Direksi. Komite Audit bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan pencegahan penipuan kami. Adanya kecurangan dan kelalaian di pihak direksi perusahaan merupakan salah satu faktor dalam pembentukan komite audit (Agoes & Ardana; 2009). Jumlah minimal anggota audit dalam suatu perusahaan terdiri dari tiga orang, dimana satu anggota berasal dari komisaris independen, dan dua lainnya berasal dari luar perusahaan.

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Komisaris dari luar perusahaan}}{\text{Dewan komisaris perusahaan}}$$

b. Komite Audit

Peran komite audit adalah untuk memantau kegiatan perusahaan agar manajemen perusahaan tidak melakukan kecurangan. Komite audit kami terdiri dari tiga anggota atau lebih, satu di antaranya adalah pejabat independen dan dua orang dari luar, dan satu anggota komite audit adalah satu untuk perusahaan dengan tiga atau lebih anggota (1) Anggota komite audit Jumlah anggota 0 kurang dari 3.

Jumlah komite audit ≥ 3 mendapat nilai 1

Jumlah komite audit <3 mendapat nilai 0

c. Sustainability Reporting

Laporan keberlanjutan dibuat oleh perusahaan untuk mengungkapkan perusahaan yang dapat meminta pertanggungjawaban semua pemangku kepentingan atas kinerja mereka dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dan upaya mereka untuk menjadi perusahaan pemakan. Perusahaan yang diterbitkan harus menyusun laporan keberlanjutan sesuai dengan Undang-Undang No. 40, Pasal 66 (2) Perseroan Terbatas. BapepamLK telah mengeluarkan aturan yang mewajibkan emiten untuk mengungkapkan pelaksanaan kegiatan CSR dalam laporan tahunannya. Dengan menerapkan laporan keberlanjutan, perusahaan harus mampu mengembangkan pertumbuhan berkelanjutan berdasarkan etika bisnis.

d. Firm Size

Menurut Riyanto (2013:313), ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan dilihat dari saham, laba, atau asetnya. Sedangkan menurut Basyaib (2007:122) ukuran perusahaan merupakan suatu indeks yang dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara: B. Pengukuran pendapatan, total kekayaan, dan total kekayaan modal. Semakin banyak pendapatan, total aset, dan total modal, semakin mencerminkan keadaan perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel terpenting dalam menjalankan bisnis. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya total aset sebanyak 4.444 perusahaan. Besarnya kekayaan suatu perusahaan adalah modal beserta hak dan kewajibannya. Semakin besar perusahaan, semakin besar aset yang dikelola dan semakin kompleks investasinya. Oleh karena itu, ukuran perusahaan, mempengaruhi akses ke sumber pendanaan perusahaan. Perusahaan besar cenderung mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat luas. Ukuran perusahaan adalah ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki aset yang besar untuk menarik investor dan menanamkan modalnya. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset (Klapper & Love, 2002). Tujuannya adalah untuk mendapatkan nomor. Data aset terdistribusi normal (Azhara, 2013). Rumus untuk menentukan ukuran perusahaan adalah:

$$\text{Size} = \ln \text{ Total Aset}$$

Proporsi Komisaris Independen terhadap Integrated Reporting

Komisaris independen adalah pemegang saham mayoritas, direktur, komisaris independen komite, atau komisaris nonbisnis atau keluarga (KNKG, 2006). Pejabat independen diangkat oleh perusahaan berdasarkan keahliannya untuk kepentingan perusahaan. Tujuan kepentingan suatu perusahaan berlaku untuk semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham mayoritas atau minoritas (Agoes & Ardana, 2009). Persentase anggota independen adalah persentase anggota independen dari seluruh anggota komite. Menurut Hermalin & Weisbach (1998), proporsi direktur independen yang lebih tinggi dalam komposisi dewan akan menguntungkan perusahaan dengan meningkatkan pengawasan dan memperoleh perspektif dan keahlian yang lebih luas. Dengan kata lain, semakin tinggi persentase direktur independen dalam dewan direksi, semakin mudah untuk mengungkapkan laporan perusahaan, termasuk laporan terintegrasi. Pejabat Tata Kelola Perusahaan Independen dapat mendorong perusahaan untuk menerbitkan laporan terintegrasi yang lebih komprehensif dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas GCG.

H₁: Proporsi Komisaris Independen Berpengaruh terhadap Integrated Reporting pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021

Komite Audit terhadap Integrated Reporting

Salah satu tugas Komite Audit adalah mengawasi kegiatan perusahaan untuk mencegah terjadinya fraud. Menurut (Agoes & Ardana, 2009), kehadiran komite audit disebabkan oleh tren meningkatnya skandal penipuan dan kelalaian oleh direksi dan eksekutif perusahaan besar baik di Amerika Serikat dan Indonesia, menunjukkan kurangnya kemampuan pemantauan yang memadai. Komite audit kami terdiri dari tiga anggota atau lebih, satu di antaranya adalah pejabat independen dan dua di antaranya adalah pejabat luar. Kehadiran komite audit diharapkan dapat membuat pengawasan manajemen lebih efektif dan efisien serta mendorong perusahaan untuk lebih banyak berbagi informasi dengan para pemangku kepentingannya. Hal ini tentu membantu perusahaan menerbitkan laporan terintegrasi. Tujuan pelaporan terintegrasi adalah untuk menciptakan nilai bagi perusahaan bagi semua pemangku kepentingan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Hal ini sesuai dengan tujuan GCG.

H₂: Komite Audit Berpengaruh terhadap Rerangka Integrated Reporting pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021.

Sustainability terhadap Rerangka Integrated Reporting

Laporan Keberlanjutan adalah laporan yang dihasilkan oleh perusahaan untuk mengukur upaya yang diungkapkan oleh perusahaan dan berupaya untuk menjadi perusahaan yang dapat meminta pertanggungjawaban semua pemangku kepentingan atas kinerja perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan. Laporan ini memuat prinsip dan standar pengungkapan. Tingkat aktivitas perusahaan terkait dengan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Menurut Setiawan (2016), perusahaan yang telah meraih Indonesian Sustainability Reporting Award siap untuk menyampaikan laporan keuangan yang terintegrasi (*integrated reporting*). Laporan terintegrasi ini penting agar para pemangku kepentingan di perusahaan dapat mengevaluasi perusahaan secara lebih komprehensif dan objektif, baik secara finansial maupun non-finansial.

H₃: Sustainability Berpengaruh terhadap Rerangka Integrated Reporting pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021.

Good Corporate Governance, Sustainability terhadap Integrated Reporting yang dimoderasi Ukuran Perusahaan

Menurut Riyanto (2013:313), ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan ditinjau dari modal, penjualan, atau aset. Ukuran Organisasi dari Scott (1981: 235) dalam Torang (2013: 93) Ukuran organisasi adalah variabel konteks yang mengukur persyaratan layanan atau produk organisasi. Jensen dan Mckling (1976) menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi daripada UKM. Ini karena banyak perusahaan didanai dengan baik untuk informasi yang mereka gunakan secara internal. Perusahaan besar dapat mempekerjakan orang-orang berbakat yang terbiasa menerapkan sistem pelaporan bisnis yang baik. Wallace dll. (1994: 49) Indikator kunci dari integritas informasi ditemukan meningkat sebesar tergantung pada ukuran perusahaan.

Rustiarini (2010) menunjukkan bahwa Sustainability Reporting berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*. Hal ini menunjukkan bahwa investor bersedia memberikan premi yang lebih kepada perusahaan yang mengungkapkan (disclose) penerapan SR dalam laporan tahunannya. Penilaian ukuran perusahaan menunjukkan semakin baik tingkat pengungkapan maka semakin baik *Integrated Reporting*. Menurut Adikusuma (2009) bahwa SR mempengaruhi *Integrated Reporting*, peningkatan SR akan meningkatkan IR dan variabel ukuran perusahaan tidak mempengaruhi IR karena hal ini disebabkan ukuran perusahaan yang tidak dapat mempengaruhi IR. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dengan manajemen perusahaan yang baik dan pasar saham yang baik, ukuran perusahaan dapat memberikan kontribusi lebih bagi perusahaan.

Standar SR yang paling diterima secara luas disebut "Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI." Tanggung jawab untuk menetapkan standar ini terletak pada Dewan Standar Keberlanjutan Global (GSSB), yang merupakan badan operasi independen di bawah payung Inisiatif Pelaporan Global (GRI). GRI adalah organisasi internasional independen yang bertanggung jawab atas standar GRI SR dan pedomannya, yang dikenal sebagai "Pedoman G4." Standar-standar ini bertujuan untuk membantu organisasi meningkatkan transparansi mereka dan melaporkan dampak positif dan negatifnya terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan mengadopsi standar ini, perusahaan dapat menentukan risiko dan peluang, meningkatkan proses pengambilan keputusan strategis, mengurangi risiko, dan membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan. Ini cocok untuk semua organisasi terlepas dari jenis, ukuran, sektor, dan negara. Standar ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, standar universal berisi landasan, pengungkapan umum, dan standar pendekatan manajemen. Kedua, standar spesifik teratas berhubungan dengan standar ekonomi, lingkungan, dan sosial. Untuk tujuan pelaporan, organisasi bebas menggunakan semua standar ini atau memilih bagian mana pun untuk mengungkapkan informasi spesifik. Menurut survei yang dilakukan oleh KPMG (2017), sejauh ini, GRI adalah standar yang

paling banyak diadopsi untuk perusahaan dapat menginterpretasikan dampak yang diharapkan dari Direksi pada pengungkapan IR.

H₄: Good Governance, Sustabilty Berpengaruh terhadap Rerangka Integrated Reporting dengan dimoderasi Firm Size pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah teknik statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mengkarakterisasi data yang dikumpulkan tanpa bermaksud menarik kesimpulan umum (Sekaran, 2014). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Subyek survei ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2017 hingga 2020. Sampel yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Pemilihan Sampel

Kriteria	Total	Akumulasi
Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2021	50	50
Emiten yang mengalami delisting pada tahun 2019-2021	3	(47)
Laporan tahunan tidak tersedia 2019-2021	4	(44)
Periode penelitian		3
Jumlah Sampel Penelitian		132

Sumber: Peneliti

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, 50 perusahaan pertambangan tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2019-2021. Sebanyak 44 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian layak untuk dijadikan sampel. Total untuk tiga periode adalah 132 sampel.

Tabel 2. Kerangka Konseptual dan Pengukuran

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
Integrated Reporting (IR)	Suatu komunikasi yang ringkas dan integrasi tentang strategi, tata kelola dan remunasi jangka pendek, menengah dan panjang.	Skor rata-rata indeks pengungkapan IR
Komisaris Independen (X1)	komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris	Proporsi komisaris independen diukur berdasarkan persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris yang ada $\text{Proporsi Komisaris Independenden} = \frac{\text{Komisaris dari luar perusahaan}}{\text{Dewan komisaris perusahaan}}$
Komite Audit (X2)	komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap	Komite audit : anggota komite audit diperusahaan $\begin{matrix} \text{Jumlah Komite Audit} \geq 3 \text{ mendapat skor } 1 \\ \text{Jumlah Komite Audit} < 3 \text{ mendapat skor } 0 \end{matrix}$

Sustainability Reporting (X3)	pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan laporan yang dibuat oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, dan upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan	Skor rata-rata indeks keberlanjutan
Firm Size (Z)	Seberapa besar informasi ang terdapat didalamnya dan mencerminkan kesadran darii pihak manajemen mengenai pentingnya informasi.	Logaritma natural dari total aset

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menganalisis data dari laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 2017 hingga 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ukuran sebagai variabel yang dimoderasi. Struktur CG menggunakan persentase anggota independen dan jumlah komite audit. Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel penyetelan. Berdasarkan rumusan kerangka dan hipotesis yang diajukan sebelumnya, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis uji hipotesis klasik, analisis regresi sederhana, dan analisis regresi berganda.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dapat memberikan gambaran tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi data yang ditampilkan meliputi minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif diuraikan di bawah ini dalam bentuk deskripsi data dari semua data yang dimasukkan ke dalam model survei. Hasil deskripsi data disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
IR	132	0,42	0,96	0,7859	0,1348
Komisaris Independen	132	0,17	0,75	0,3997	0,1257
Komite Audit	132	0,00	1,00	0,937	0,2439
Sustainability Reporting	132	0,00	0,97	0,5897	0,2642
Firm Size	132	25,86	32,05	29,161	1,4758

Sumber: Data sekunder diolah (2022)

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengkonfirmasi atau membuktikan kebenaran dari hipotesis penelitian yang diajukan. Uji hipotesis menggunakan uji ini untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas dan masing-masing variabel kontrol terhadap variabel terikat. Uji-F, di sisi lain, digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen dan kontrol terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ,5%. Berikut adalah hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan software pengolah statistik SPSS.

Proporsi Komisaris Independen terhadap *Integrated Reporting*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa p-value adalah 0,348. Artinya lebih besar dari 0,05 ($0,348 > 0,05$). Dalam hal ini, persentase variabel dalam Komite Independen tidak memiliki dampak substansial terhadap konsistensi laporan tahunan dengan kerangka IR. Dari hasil uji hipotesis kita dapat

menyimpulkan bahwa H1 yang diajukan tidak didukung. Sesuai ketentuan yang berlaku, ketentuan persentase anggota independen dari seluruh anggota KPPU adalah 30%. Namun, keberadaan pejabat independen dalam suatu perusahaan hanya untuk memenuhi persyaratan dan dapat menjadi persyaratan bagi perusahaan untuk menerapkan tata kelola perusahaan (Wijaya, 2009). Kehadiran anggota independen dalam perusahaan diharapkan dapat mewakili kepentingan pemegang saham minoritas, namun jumlah anggota independen lebih sedikit daripada jumlah direksi yang mewakili pemegang saham mayoritas. Ini menonaktifkan kemampuan pemantauan dan pengambilan keputusan petugas independen. Pengawasan yang tidak efisien menyebabkan pengungkapan informasi perusahaan yang tidak lengkap kepada pemangku kepentingan dan mempengaruhi tingkat integritas laporan tahunan dan kerangka pelaporan terintegrasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Sariat al. (2013) Komite Independen tidak boleh menggunakan laporan keberlanjutan untuk meninjau laporan tahunan. Hasil ini saat ini tidak konsisten dengan penelitian Frias Aceituno et al. (2013) Dewan mencatat bahwa ini akan mempengaruhi penyebaran informasi yang terintegrasi.

Komite Audit terhadap Integrated Reporting

Hasil pengujian menunjukkan bahwa p-value adalah 0,016, lebih kecil dari 0,05 ($0,016 < 0,05$). Dalam hal ini, variabel panel berpengaruh besar terhadap IR. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa H₂ terdukung. Komite Audit bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan perusahaan agar manajemen tidak terlibat dalam kegiatan penipuan. Komite Audit juga dapat menunjukkan kewajibannya dengan meminimalkan masalah keagenan dan menekan agen (manajemen) untuk bertindak adil demi kepentingan pemegang saham. Komite Audit diharapkan dapat mendukung prinsip akuntabilitas dalam penerapan tata kelola perusahaan, yang mengarahkan perusahaan untuk memberikan informasi yang akurat dalam laporan keuangannya. Komite Audit dapat mendorong manajemen perusahaan untuk bekerja lebih efektif dan efisien untuk memfasilitasi pengungkapan informasi perusahaan, termasuk laporan tahunan perusahaan, sesuai dengan laporan terintegrasi. Studi ini konsisten dengan Survei Ahmed H. & Abdifatah (2015) dan Ahmed & Anifowose (2016), yang menunjukkan bahwa Komite Audit mempengaruhi tingkat konsistensi antara laporan tahunan dan kerangka kerja IR. Di sisi lain, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Habbash (2015) bahwa komite audit tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan perusahaan yang menggunakan pernyataan kewajiban.

Sustainability Reporting terhadap Integrated Reporting

Hasil pengujian menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,255 lebih besar dari 0,05 ($0,205 > 0,004$). Dalam hal ini, variabel SustainableReporting tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan terintegrasi. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa H3 yang diajukan tidak didukung. Sustainability Report adalah laporan yang dihasilkan oleh perusahaan untuk mengukur upaya yang dilakukan perusahaan dan menjadi perusahaan yang dapat meminta pertanggungjawaban semua pemangku kepentingan atas kinerja perusahaan terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Laporan ini memuat prinsip dan standar pengungkapan. Tingkat aktivitas perusahaan tersebut terkait dengan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Menurut Setiawan (2016), perusahaan peraih Indonesia Sustainability Reporting Award siap menyampaikan laporan keuangan terintegrasi. Laporan terintegrasi ini penting agar para pemangku kepentingan di perusahaan dapat mengevaluasi perusahaan secara lebih komprehensif dan objektif, baik secara finansial maupun non-finansial.

Good Governance, Sustainability Reporting terhadap Integrated Reporting dengan dimoderasi Firm Size

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah 5,370 dan nilai signifikansinya adalah 0,000. Karena nilai kepentingannya kurang dari 0,05 ($0,00 > 0,05$), kita dapat menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi dampak tata kelola yang baik dan pelaporan keberlanjutan pada pelaporan terintegrasi. Menurut Riyanto (2013:313), ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya modal, penjualan, atau aset. Ukuran Organisasi oleh Scott (1981: 235) dalam Torang (2013: 93) Ukuran organisasi adalah variabel konteks yang mengukur persyaratan layanan atau produk organisasi. Jensen dan McKling (1976) menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung

mengungkapkan lebih banyak informasi daripada perusahaan kecil. Hal ini karena banyak perusahaan menyediakan dana yang cukup untuk informasi untuk penggunaan internal. Perusahaan besar dapat mempekerjakan orang-orang berbakat yang terbiasa menerapkan sistem pelaporan bisnis yang baik. Wallace et al (1994: 49) menemukan bahwa indikator integritas informasi utama meningkat tergantung pada ukuran perusahaan. Menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan mempengaruhi laporan terintegrasi.

Hubungan antara sustainability reporting dengan integrated reporting melalui pengungkapan ukuran perusahaan memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini Research (2010) yang menunjukkan bahwa Sustainability Reporting berpengaruh terhadap Integrated Reporting. Hal ini menunjukkan bahwa investor bersedia memberikan lebih banyak 5582 pengaruh tata kelola perusahaan yang baik dan pelaporan keberlanjutan terhadap ukuran perusahaan yang dimediasi pelaporan terpadu pjaee, 18(4) (2021) premi kepada perusahaan yang mengungkapkan (disclose) pelaksanaan PK dalam laporan tahunannya. Penilaian ukuran perusahaan menunjukkan semakin baik tingkat pengungkapan maka semakin baik Integrated Reporting. Menurut Adikusuma (2009) bahwa SR mempengaruhi Integrated Reporting, meningkat SR akan meningkatkan IR dan variabel ukuran perusahaan tidak mempengaruhi IR karena hal ini disebabkan ukuran perusahaan tidak dapat mempengaruhi IR Berdasarkan penelitian sebelumnya, dengan manajemen perusahaan yang baik dan pasar saham yang baik, ukuran perusahaan dapat memberikan kontribusi lebih bagi perusahaan.

PENUTUP

Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak struktur tata kelola perusahaan terhadap integritas laporan tahunan dan kerangka Integrated Reporting (IR). Struktur CG terdiri dari komisaris independen, komite audit, dan persentase ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel moderat. Sampel yang digunakan dalam survei ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2017 hingga 2020. Hasil survei persentase dan keberlanjutan kontraktor independen tidak akan mempengaruhi pelaporan terintegrasi perusahaan untuk periode 2020. Komite Audit, di sisi lain, mempengaruhi pelaporan terintegrasi. Selain itu, ukuran perusahaan dapat dikoordinasikan antara tata kelola perusahaan yang baik dan pelaporan keberlanjutan.

Peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian untuk meneliti faktor lain yang berkaitan dengan sustainability report seperti kepemilikan saham pemerintah. Diharapkan lebih banyak perusahaan menyusun sustainability report, dan agar selalu konsisten untuk mengeluarkan sustainability report. dengan adanya sustainability report hendaknya investor menilai perusahaan tidak hanya melihat pada aspek ekonomi perusahaan saja, tetapi bagaimana perusahaan tersebut peduli pada lingkungan dan sosialnya melalui sustainability report sehingga para investor dapat mengambil keputusan yang tepat sebelum berinvestasi ke perusahaan dan secara tidak langsung dapat turut andil dalam menjaga keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

REFERENSI

- Alkhafaji, A. F. (2007). Corporate governance: The evolution of the Sarbanes-Oxley Act and its impact on corporate America. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, 17(3). 193-202.
- Haji, A. A. (2015). The role of audit committee attributes in intellectual capital disclosures: Evidence from Malaysia. *Managerial Auditing Journal*, 30(8/9). 756-784.
- Haji, A. A., & Anifowose, M. (2016). Audit committee and integrated reporting practice: does internal assurance matter?. *Managerial Auditing Journal*, 31(8/9). 915-948.
- IIRC. (2013). *The International Framework*. Obtained from <https://integratedreporting.org/wpcontent/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf>.
- Kustiani, N. A. (2016). Penerapan elemen-elemen integrated reporting pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Info Artha*, 3, 44-61.
- Lipunga, A. M. (2015). Integrated Reporting in Developing Countries : Evidence from Malawi. *Journal of Management Research*, 7(3): 30–56.
- Nurafiati, R. (2011). Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Lingkungan. *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada
- Nurhidayat, I. (2011). Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Nilai Pasar Perusahaan Perbankan Publik di Indonesia Tahun 2003-2007. *Tesis*. UGM
- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*.
- Peat, M. (2011). The integrated imperative. *Accountancy Futures*, (3), 8-9.
- PricewaterhouseCoopers. (2013). Point of View Integrated Reporting Going Beyond The Financial Results. Diambil pada tanggal 22 Februari 2020. dari www.pwc.com
- Puspita, G. M. (2014). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Rasio Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Economic Value Added (EVA). *Skripsi*. UGM
- Sinaga, A. M. (2011). Pengaruh Elemen Good Corporate Governance (GCG) terhadap Cooperate Social Responsibility (CSR) pada Sektor Perbankan Indonesia. *Skripsi*. UGM